

Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik dalam Penafsiran

Aghisna Rahmatika^{1*}, Siska Lailan Munira RKT², Restu Permohonan Hasibuan³, Jendri Jendri⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email : aghisnarahmatika20@gmail.com^{1*}, siskalailanmunira@gmail.com²,
restupermohonanhasibuan@gmail.com³, jendria3@gmail.com⁴

Abstract, This article discusses ethics in three domains of life: family, society, and politics. Family ethics emphasizes the importance of noble values such as love, mutual respect and responsibility in building harmonious relationships. Community ethics encourages attitudes of tolerance, mutual cooperation and concern for others to create a peaceful and prosperous social life. Political ethics focuses on the principles of justice, honesty and accountability in running government to achieve shared prosperity. These three domains are interrelated and influence each other, so it is important to build strong ethics in each domain in order to create a civilized, just and prosperous society.

Keywords: Ethics, family, society, and noble values

Abstrak, Artikel ini membahas tentang etika dalam tiga ranah kehidupan: keluarga, masyarakat, dan politik. Etika berkeluarga menekankan pentingnya nilai-nilai luhur seperti kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab dalam membangun hubungan yang harmonis. Etika bermasyarakat mendorong sikap toleransi, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai dan sejahtera. Etika berpolitik menitikberatkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ketiga ranah ini saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga penting untuk membangun etika yang kuat di masing-masing ranah agar tercipta masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera.

Kata Kunci : Etika, Keluarga, Masyarakat, dan Nilai Luhur

1. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia merupakan sebuah tatanan yang kompleks, dijalani dalam berbagai ranah dengan aturan dan nilai-nilai yang melandasinya. Salah satu aspek penting yang mengatur hubungan antar manusia adalah etika (Akhyar, Nelwati, et al., 2024). Etika, sebagai sistem nilai dan moral yang mengatur perilaku manusia, menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, etika dapat dilihat dalam tiga ranah utama: keluarga, masyarakat, dan politik.

Etika berkeluarga menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Nilai-nilai luhur seperti kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab menjadi pondasi penting dalam membentuk keluarga yang kuat dan bahagia. Etika bermasyarakat, di sisi lain, mendorong sikap toleransi, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai dan Sejahtera (Acim et al., 2022).

Pada ranah politik, etika memegang peranan krusial dalam menjalankan roda pemerintahan. Prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas menjadi pedoman utama dalam menjalankan kekuasaan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ketiga ranah ini saling terkait dan saling memengaruhi. Etika yang kuat di masing-masing ranah akan melahirkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera.

Oleh karena itu, memahami dan menerapkan etika dalam ketiga ranah ini menjadi sangat penting. Melalui penafsiran yang mendalam, kita dapat menggali makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam etika berkeluarga, bermasyarakat, dan berpolitik, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penjelajahan etika dalam tiga ranah kehidupan ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik etika berkeluarga, bermasyarakat, dan berpolitik. Sumber literatur tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lain yang membahas etika dalam perspektif filosofi, agama, dan sosiologi.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan mencatat informasi penting dari berbagai sumber literatur. Data yang terkumpul kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan secara sistematis untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang etika dalam tiga ranah kehidupan tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk menelusuri makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam etika secara mendalam, serta menganalisis hubungan antar konsep dan prinsip etika dalam tiga ranah kehidupan yang saling terkait.

Selain studi literatur, metode ini juga melibatkan analisis kritis dan refleksi terhadap praktik etika dalam kehidupan nyata. Analisis kritis dilakukan untuk menilai sejauh mana nilai-nilai etika diterapkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berpolitik. Refleksi dilakukan untuk mengevaluasi implikasi dari penerapan etika terhadap kehidupan individu dan masyarakat.

3. PEMBAHASAN

Etika Dalam Berkeluarga

Dalam upaya membina keluarga Sakinah, mawaddah wa rahmah, pasangan suami isteri, hendaknya melaksanakan, antara lain, sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Dalam Keluarga

Berkenaan dengan tanggung jawab dalam keluarga, Allah berfirman dalam Qs. An-Nisa: 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya :

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dalam ayat yang telah disebutkan di atas terkandung beberapa hukum, sebagai berikut:

1) Suami adalah sebagai pemimpin/kepala keluarga.

Menurut Jawad Mughniyah, ayat tersebut tidak dimaksudkan untuk menunjukkan adanya perbedaan derajat antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri), melainkan menegaskan bahwa keduanya memiliki kedudukan yang setara. Suami dan istri digambarkan sebagai dua pilar kehidupan yang saling membutuhkan dan melengkapi. Ayat tersebut secara spesifik menegaskan peran suami dalam konteks kepemimpinan rumah tangga, yaitu memimpin istrinya, bukan untuk memberikan hak kepemimpinan secara umum atau menjadi pemimpin yang otoriter (Agus, 2022).

Ayat ini dimaksudkan untuk mempertegas pembagian peran antara suami dan istri dalam rumah tangga. Suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menjaga,

membela, bertindak sebagai wali, dan memberikan nafkah. Keunggulan laki-laki dalam hal kemampuan mencari nafkah dan kekuatan untuk melindungi memungkinkan perempuan lebih fokus menjalankan tugas-tugas yang sesuai dengan fitrahnya, seperti mengandung, melahirkan, dan mengasuh anak. Dengan pembagian peran ini, perempuan (istri) dapat merasa tenteram, sejahtera, dan tercukupi seluruh kebutuhannya.

2) Suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga.

Berkenaan dengan tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah utama keluarga, antara lain disebutkan pula di dalam Qs Al – Thalaq Ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Artinya :

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

3) Suami sebagai pendidik isteri yang nusyuz

Menurut Al-Thabary, didalam ayat 34 surah An Nisa menegaskan peran laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, khususnya dalam mendidik dan membimbing perempuan. Kepemimpinan ini berakar pada kewajiban suami untuk memberikan mahar dan menafkahi keluarganya. Ia menekankan bahwa ayat ini lebih mengacu pada tanggung jawab suami dalam rumah tangga daripada kepemimpinan secara umum. Sebagai pemimpin keluarga, suami bertugas membina istrinya, dan jika diperlukan, dapat memberikan teguran hingga pukulan ringan yang tidak menyakitkan sebagai langkah terakhir untuk memperbaiki keadaan. Dengan demikian, tanggung jawab nafkah menjadi dasar utama peran suami sebagai pemimpin keluarga (Tuba, 2023).

Etika Dalam Bermasyarakat

Etika dalam bermasyarakat merupakan pedoman yang mengatur bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sosial. Etika ini bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati antara anggota masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, empati, dan tanggung jawab. Dalam

bermasyarakat, etika memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu, serta membangun rasa saling percaya dan solidaritas (Albab et al., 2024).

Melalui penerapan etika, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman dan toleransi, sehingga konflik dapat diminimalkan. Etika juga mendorong individu untuk bertindak dengan penuh kesadaran terhadap dampak perilakunya, baik terhadap orang lain maupun terhadap lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, etika bukan hanya sekadar aturan tertulis, melainkan juga kebiasaan yang tumbuh dari nilai-nilai moral dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, etika bermasyarakat menjadi landasan penting dalam membangun peradaban yang maju dan beradab (Akhyar & Kosim, 2024).

Banyak dari para ulama yang telah memaparkan konsep etika dalam Islam pada karya-karyanya, tak terkecuali dengan ulama Indonesia, Hamka yang dianggap sebagai etikus Muslim Nusantara. Hamka mempunyai konsep yang utuh mengenai etika yang dituangkan dalam berbagai karyanya sebagai bukti kepeduliannya atas persoalan sosial yang terjadi di Indonesia. Etika bermasyarakat menurut Hamka yang dijelaskan dalam tafsirnya adalah sebagai berikut:

1. **Senantiasa Berlaku Adil**

كُرُونْ بِعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَرُونَ ۚ يَتَىٰ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَاللَّهُ يُؤْمَرُ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا حَسَنَ وَلَا

Artinya

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl : Ayat 90) (Akhyar, Batubara, et al., 2024).

Muhammad Yusuf Musa menyebut ayat ini sebagai landasan etika dalam Al-Qur'an karena mengandung ajaran yang sangat komprehensif, mencakup anjuran untuk menegakkan kebaikan dan keadilan, sekaligus larangan terhadap perbuatan buruk dan merusak. Para mufassir juga menegaskan bahwa ayat ini menjadi pedoman moral universal yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar etika dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat (Hanafi, 2021).

Hamka menekankan pentingnya perintah pertama dalam ayat tersebut, yaitu berlaku adil kepada sesama. Beliau menjelaskan bahwa keadilan adalah fondasi utama dalam menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Keadilan, menurut Hamka, setara dengan larangan

untuk berbuat zalim, karena perbuatan zalim merupakan wujud nyata dari aniaya yang terlihat secara jelas. Zalim sering kali diwujudkan dalam tindakan merebut hak orang lain atau mencari keuntungan pribadi dengan cara yang tidak benar.

2. Berbuat Kebaikan (Ihsan)

Dalam tafsirnya, Hamka menjelaskan makna mendalam dari perintah kedua dalam Q.S. An-Nahl ayat 90, yaitu berlaku ihsan kepada sesama. Menurut Hamka, ihsan memiliki dua makna utama. Pertama, ihsan berarti senantiasa meningkatkan kualitas amal perbuatan dengan melakukan yang lebih baik dari sebelumnya. Ini mencerminkan upaya individu untuk terus memperbaiki diri dan mencapai tingkat kebaikan yang lebih tinggi dalam setiap tindakan (Hakim & Bayyinah, 2023).

Makna kedua dari ihsan, sebagaimana dijelaskan Hamka, adalah berbuat lebih baik daripada sekadar bersikap adil terhadap sesama makhluk. Jika keadilan berarti memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, maka ihsan melampaui keadilan dengan memberikan lebih dari yang semestinya. Hamka memberikan contoh, jika seseorang memberikan upah yang sesuai dengan tenaga kerja yang diberikan, itu disebut adil. Namun, jika ditambahkan bonus sebagai bentuk penghargaan, itu disebut ihsan. Contoh lainnya adalah dalam kasus utang piutang. Menagih utang adalah bentuk keadilan, tetapi memaafkan utang adalah manifestasi ihsan.

Hamka juga menyoroti bahwa ihsan mengandung makna kebajikan yang luas. Salah satu bentuk ihsan adalah mencintai dan memperhatikan sanak kerabat. Dalam hal ini, ihsan mendorong seseorang untuk berusaha keras membahagiakan orang lain, termasuk anak, istri, dan keluarga besar. Ini menunjukkan bahwa ihsan tidak hanya terbatas pada tindakan individual, tetapi juga mencakup pengorbanan kepentingan pribadi demi kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Hamka juga menyatakan bahwa *keadilan* adalah bagian dari kebajikan, tetapi kebajikan tidak dapat terwujud tanpa adanya keadilan. Dengan demikian, ihsan menjadi puncak dari nilai-nilai moral dan etika yang lebih tinggi, yang menginspirasi manusia untuk melampaui kewajiban formal dan memberikan yang terbaik bagi sesama. Korelasi antara keadilan, kebajikan, dan ihsan dalam ayat ini mencerminkan harmoni yang harus dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, di mana setiap individu tidak hanya menjalankan hak dan kewajiban secara adil, tetapi juga berkontribusi lebih jauh melalui kebaikan dan kemurahan hati (Nisa et al., 2022).

3. Memperhatikan Kerabat

Dalam tafsirnya, Hamka memberikan penjelasan yang mendalam mengenai perintah ketiga dalam Q.S. An-Nahl ayat 90, yaitu memberi kepada keluarga yang terdekat. Hamka menghubungkan perintah ini dengan keadaan sosial masyarakat, khususnya di Indonesia, di mana meskipun sesama umat Islam dianggap bersaudara, kenyataannya tidak semua orang memiliki nasib yang sama. Banyak keluarga atau kerabat yang mengalami kesulitan atau kekurangan, sementara sebagian lainnya memiliki lebih banyak rezeki dan kemampuan untuk membantu.

Hamka menekankan bahwa orang yang lebih mampu dianjurkan untuk mendahulukan pemberian kepada keluarganya yang membutuhkan, sebelum menyalurkan bantuan kepada orang lain. Ini mencerminkan pentingnya memperhatikan hak-hak keluarga dan kerabat terdekat terlebih dahulu, karena mereka adalah pihak yang paling langsung terkait dengan kita. Dalam konteks ini, Allah berpesan bahwa rezeki yang diberikan-Nya kepada seseorang bukanlah semata-mata miliknya, tetapi juga terdapat hak orang lain di dalamnya, khususnya keluarga dan kerabat yang membutuhkan pertolongan (Ismatulloh, 2017).

Dengan demikian, Hamka menekankan bahwa memberi kepada keluarga yang terdekat adalah suatu kewajiban moral yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam perspektif ini, membantu keluarga yang kurang mampu bukan hanya sebatas kewajiban sosial, tetapi juga merupakan bentuk amal ibadah yang mendapatkan ridha Allah. Hal ini juga menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dimulai dari perhatian dan kepedulian terhadap kondisi keluarga dan kerabat di sekitar kita.

Etika Dalam Berpolitik

Dalam Qs. An-Nisa Ayat 58

كَأَنّٰٓ اِنَّ اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ نِعَمًا يَّعِظُكُمْ بِهٖ ۚ وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا اِلَّا مِّنْتِ اِلٰى اَهْلِهَا
سَمِيعًا بَصِيْرًا

Artinya

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' : 58)

1. Amanah

Amanah merupakan nilai yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an dan menjadi simbol utama dalam kehidupan seorang Muslim. Dalam konteks ini, amanah mencakup kewajiban untuk menjaga dan melaksanakan tanggung jawab dengan jujur dan penuh integritas, baik dalam urusan pribadi maupun hubungan sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 58, kata *tana'mal* berasal dari kata yang mengandung arti ketenangan atau tidak takut, yang menunjukkan bahwa orang yang menunaikan amanah dengan penuh tanggung jawab akan merasakan kedamaian dan ketenangan dalam hidupnya (Aditia, 2020).

Amanah merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada umat manusia, termasuk dalam menjalankan ibadah seperti salat lima waktu, yang juga merupakan amanah dari Allah. Selain itu, amanah yang diberikan oleh sesama manusia, termasuk tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah, juga harus dijaga dengan baik. Jika seorang pemimpin atau pemerintah mampu menjaga amanah dengan baik, maka keadilan yang menyeluruh akan terwujud dalam masyarakat. Keberhasilan pemerintah dalam menegakkan amanah akan menghasilkan kepercayaan dari rakyat, yang akhirnya menciptakan ketertiban dan kepatuhan terhadap kebijakan yang diambil.

Namun, sebagai bagian dari etika Islam, ada batasan dalam ketaatan terhadap kebijakan pemerintah. Meskipun pemerintah memiliki amanah untuk menjaga dan memimpin rakyat, tidak semua kebijakan pemerintah dapat diterima begitu saja. Kebijakan yang tidak memperhatikan kemaslahatan umum atau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis tidak wajib untuk dituruti. Dalam hal ini, seorang Muslim harus bijak dalam menilai kebijakan pemerintah, dan jika kebijakan tersebut merugikan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, maka ia tidak wajib untuk melaksanakannya (Wartini, 2014).

Salah satu ciri orang yang beriman adalah kemampuannya untuk memegang amanah dengan baik. Seorang Muslim yang beriman akan selalu berusaha menjaga integritas, bertindak jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap amanah yang diembannya. Dengan memegang amanah dengan baik, baik dalam urusan pribadi maupun dalam menjalankan tanggung jawab sosial, seseorang akan mendapatkan ketenangan hidup dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya.

2. Keadilan

Keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada penegakan hukum untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berucap dan bersikap terhadap diri sendiri dan orang lain. Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya keadilan adalah dalam QS. Al-An'am ayat 152, yang menyebutkan bahwa umat Islam diharuskan berlaku adil dalam berbagai situasi. Ayat ini menekankan beberapa hal penting yang mencakup keadilan dalam berbicara, dalam menunaikan janji, serta dalam menjaga hak-hak orang lain, seperti hak anak yatim.

Tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa manusia cenderung memihak, terutama dalam berucap, seperti kepada keluarga sendiri. Namun, Al-Qur'an menegaskan bahwa meskipun berbicara kepada kerabat, seorang Muslim tetap harus adil, yaitu berbicara dengan jujur dan tanpa memihak. Kejujuran dan keadilan dalam berbicara ini penting untuk menjaga transparansi dan membangun kepercayaan, yang pada gilirannya akan menciptakan keterbukaan dalam berbagai urusan penting (Zhafir, 2024).

Selain itu, dalam konteks kehidupan sosial-politik, strategi untuk menetapkan hukum yang adil harus seiring dengan penerapan etika. Etika dalam berpolitik, dalam hal ini, berfungsi sebagai panduan moral yang mengarahkan hukum agar bisa menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik. Etika dan hukum harus berjalan bersama untuk mencapai tujuan utama, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguasa dan masyarakat perlu berkomunikasi dengan baik untuk menciptakan budaya partisipasi yang aktif, di mana setiap pihak bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum.

Dalam hal penegakan hukum itu sendiri, etika sangat diperlukan oleh para penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap berani, tegas, jujur, dan disiplin dalam menjalankan tugas. Penegakan hukum yang adil tidak akan tercapai tanpa adanya keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit dan tanpa adanya integritas dalam bertindak. Keberanian hakim untuk bertindak tegas terhadap yang bersalah, tanpa rasa takut atau pandangan subjektif, sangat penting untuk menjaga keadilan di masyarakat (Wartini, 2014).

Secara keseluruhan, keadilan dalam Al-Qur'an mengajarkan bahwa berbuat adil bukan hanya tentang hukum yang diterapkan secara tepat, tetapi juga tentang sikap adil dalam berbicara, bertindak, dan membuat keputusan, terutama dalam konteks hubungan sosial dan politik.

3. Relasi, Urgensi, dan Norma Etika dalam Dunia Politik

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*, pembahasan terkait politik dalam Al-Qur'an dapat ditemukan pada ayat-ayat yang menggunakan kata hukum, yang berasal dari akar kata yang berarti "menghalangi atau melarang dengan tujuan mengadakan perbaikan". Dalam konteks ini, hukum mengacu pada penetapan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang mengarah pada perbaikan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh penggunaan lafaz hukum dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa' (4:58), yang berbicara mengenai kewajiban untuk menetapkan keputusan dengan keadilan dan mematuhi keputusan tersebut (Aditia, 2020).

Ayat ini mengingatkan bahwa dalam proses penetapan putusan, khususnya dalam konteks politik dan hukum, seorang hakim atau pemimpin harus selalu mengutamakan prinsip keadilan. Keputusan yang diambil harus dilandasi dengan norma-norma yang berlaku, dan jabatan yang diamanahkan kepada seseorang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan kode etik yang ada. Dalam hal ini, etika memainkan peran yang sangat penting untuk menjaga integritas dalam menjalankan kewajiban, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial secara umum.

a. Relasi Etika dan Politik

Hubungan antara etika dan politik memang sering kali diabaikan atau bahkan dianggap tidak relevan. Banyak orang yang berpendapat bahwa berbicara tentang etika politik bagaikan "teriak di gurun pasir", yaitu tidak ada pengaruh atau respon yang signifikan. Hal ini dikarenakan dunia politik sering kali beroperasi dengan sistem yang jauh dari ideal, di mana tujuan dan ambisi pribadi atau kelompok sering kali menghalalkan berbagai cara untuk mencapainya. Salah satu contoh nyata dari ketidaksesuaian antara etika dan politik adalah praktek **money politics** (politik uang) yang sering terjadi selama Pemilu, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip etika yang seharusnya diterapkan dalam politik.

Namun, meskipun praktik-praktik yang tidak etis tersebut masih terjadi, penting untuk mengingat bahwa etika dapat menjadi alat untuk memperbaiki dunia politik. Salah satu strategi penting dalam menanggulangi kasus-kasus buruk dalam politik adalah dengan memperkuat etika dalam kehidupan politik. Penguatan etika ini harus dimulai dari berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, sosial, pemerintahan, dan masyarakat.

Etika yang diperkuat akan membantu menegakkan prinsip-prinsip moral dan meningkatkan kualitas politik, sehingga dapat tercipta perubahan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Urgensi Etika Politik

Etika politik memiliki urgensi yang sangat penting, terutama ketika kondisi politik suatu negara sedang kacau atau terpuruk. Dalam kondisi seperti ini, etika politik menjadi sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa otoritas dalam pemerintahan tetap berlandaskan pada norma moral, hukum, dan aturan yang berlaku. Tanpa etika politik, negara akan kehilangan tujuannya, karena sikap dan perilaku para elite politik bisa berbeda jauh dengan visi dan misi negara. Ketidaksesuaian ini bisa menyebabkan kegagalan dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat.

Menurut Haryatmoko, ada tiga dimensi dalam etika politik yang perlu diperhatikan: tujuan, sarana, dan aksi politik. Dimensi tujuan berkaitan dengan capaian yang ingin dicapai dalam politik, seperti kesejahteraan warga, kedamaian, kebebasan, persamaan hak, dan keadilan. Dimensi sarana meliputi alat-alat atau sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, serta prinsip-prinsip dasar dalam mengelola organisasi sosial. Sedangkan dimensi aksi politik berkaitan dengan tindakan dan moral yang ditampilkan oleh para pelaku politik, yang harus menciptakan ide-ide berdasarkan aturan politik yang ada dan mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi dari ide-ide tersebut.

c. Norma-Norma dalam Etika Politik

Perilaku dan sikap pejabat pemerintah sangat menentukan kelancaran jalannya pemerintahan. Meskipun aturan yang ada dalam sistem pemerintahan sudah baik, jika pejabat yang menjalankannya tidak memiliki kualitas pengetahuan dan etika yang memadai, maka roda pemerintahan akan terhambat. Oleh karena itu, seorang politisi tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang keilmuannya, tetapi juga harus memiliki integritas moral dan norma-norma etis dalam menjalankan tugasnya. Pemerintahan yang baik tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak didasari oleh nilai-nilai etika, terutama yang berhubungan dengan nilai baik dan buruk dalam perilaku pejabat politik.

Norma-norma etika dalam politik ini mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kepentingan umum. Tanpa adanya kepatuhan terhadap norma-norma etika, pemerintahan akan gagal dalam mewujudkan tujuan-tujuan kesejahteraan dan

keadilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap politisi untuk tidak hanya memikirkan kekuasaan, tetapi juga untuk menjaga integritas moralnya, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mengarah pada kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat (Zhafir, 2024).

4. KESIMPULAN

Artikel ini membahas tentang etika dalam tiga ranah kehidupan: keluarga, masyarakat, dan politik. Ketiga ranah ini saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga penting untuk membangun etika yang kuat di masing-masing ranah agar tercipta masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera.

Etika Berkeluarga : Menekankan pentingnya nilai-nilai luhur seperti kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab dalam membangun hubungan yang harmonis, Tanggung jawab suami sebagai pemimpin, pencari nafkah, dan pendidik istri yang nusyuz.

Etika Bermasyarakat : Mendorong sikap toleransi, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama untuk menciptakan kehidupan sosial yang damai dan sejahtera, Berlaku adil, berbuat kebaikan (ihsan), dan memperhatikan kerabat.

Etika Berpolitik : Menitikberatkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan bersama, pentingnya amanah, keadilan, dan relasi antara etika dan politik.

REFERENSI

- Acim, S. A., Sugiarto, F., & Wahyudi, A. I. (2022). ANALISIS PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG KARAKTER SEORANG PEMIMPIN DALAM TAFSIR AL-MISBAH. *El-Umdah*, 5(2), 145–158.
- Aditia, A. (2020). *Etika Berpolitik Dalam Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah 1950*. Universitas Jambi.
- Agus, A. (2022). *STUDI KOMPARASI TAFSIR SURAT LUQMAN AYAT12-19 ANTARA TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL MARAGHI TENTANG PENDIDIKAN KECERDASAN EMOSIONAL*. UNDARIS.
- Akhyar, M., Batubara, J., & Deliani, N. (2024). The central role of the Quran in the development of the Islamic educational paradigm. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 9(1), 25–38.

- Akhyar, M., & Kosim, M. (2024). Gagasan Pembaharuan Pendidikan Islam Berkemajuan Perspektif KH Ahmad Dahlan. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.52185/kariman.v12i1.379>
- Akhyar, M., Nelwati, S., & Khadijah, K. (2024). The Influence Of The Profile Strengthening Of Pancasila Students (P5) Project On Student Character At SMPN 5 Payakumbuh. *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1).
- Albab, H. U., Sulthoni, A., & Romadlon, A. F. N. (2024). Etika Keluarga dalam QS. At-Tahrim Perspektif Hasby Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur. *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 38–57.
- Hakim, L. N., & Bayyinah, I. (2023). Etika Sosial Perspektif Mufassir Nusantara: Kajian Qs. Al-Hujurat Ayat 9-13 Dalam Tafsir Al-Ibriz. *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies*, 1(1), 70–86.
- Hanafi, R. (2021). *Etika Berbicara Dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab*. IAIN Ponorogo.
- Ismatulloh, A. M. (2017). Etika Berkomunikasi dalam Al-Qur'an Analisis Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqi Dalam Tafsir An-Nur. *Lentera*.
- Nisa, I. F. C., Erina, M. D., Haliza, D. A. N., & Nasrum, A. J. (2022). Etika Sosial Kemasyarakatan dalam Al-Qur'an Studi Pemaknaan QS. Al-Hujurat Perspektif Tafsir Al-Mubarak. *Jurnal Riset Agama*, 2(1), 30–41.
- Tuba, M. H. (2023). *ETIKA SOSIAL PERSPEKTIF TAFSIR AL-IBRIZ KARYA BISRI MUSTOFA*. UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA.
- Wartini, A. (2014). Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 109–126.
- Zhafir, M. R. (2024). *KONSEP POLITIK BERKEADABAN PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBAH*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.